

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN OPERASIONAL REFORMA AGRARIA DI INDONESIA: REFORMA AGRARIA DEMOKRATIS MELALUI INTERNALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA

ANDI TENRI ABENG



**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pengembangan Kebijakan Operasional Reforma Agraria di Indonesia: Reforma Agraria Demokratis melalui Internalisasi Partisipasi Masyarakat yang Bermakna” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Januari 2025

Andi Tenri Abeng
K1601202041

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RINGKASAN

ANDI TENRI ABENG. Pengembangan Kebijakan Operasional Reforma Agraria di Indonesia: Reforma Agraria Demokratis melalui Internalisasi Partisipasi Masyarakat yang Bermakna. Dibimbing oleh JOYO WINOTO, ENDRIATMO SOETARTO dan YUDHA HERYAWAN ASNAWI.

@Hak cipta milik IPB University

Reforma Agraria (RA) di Indonesia adalah upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang telah lama menjadi isu mendasar. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menekankan fungsi sosial hak atas tanah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ketimpangan penguasaan tanah masih menjadi masalah serius, sebagian besar aset tanah dikuasai oleh segelintir pihak. Perkembangan kebijakan agraria di Indonesia, sejak era kolonial hingga reformasi, mencerminkan upaya untuk mengatasi ketimpangan. Legalisasi tanah, distribusi dan redistribusi tanah, serta pemberian akses telah dilaksanakan, tetapi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat belum optimal. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan RA adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi yang bermakna (bukan partisipasi pasif apalagi manipulatif) dalam setiap tahap pelaksanaan RA merupakan elemen kunci tidak hanya pada level kebijakan melainkan juga pada level praktik. Pengambilan keputusan oleh aktor negara (sebagai penyelenggara) tanpa mempertimbangkan keputusan masyarakat (sebagai penerima manfaat), sering kali tidak efektif dan memenuhi harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model RA di Indonesia berbasis pengalaman RA di dunia dan praktik RA di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *democratic land governance* dari Borras dan Franco (2008) dan *pro poor land governance* dari Borras dan Franco (2010), mengevaluasi kinerja RA berdasarkan kualitas capaian kinerja dan kualitas capaian output RA, serta membangun konstruksi sosial atas RA yang demokratis berbasiskan partisipasi masyarakat yang bermakna pada aras kebijakan operasional. Penelitian dilakukan di wilayah yang telah melaksanakan RA, yaitu di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Pandeglang, dan Malang.

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mengukur hubungan antara kualitas interaksi negara dan masyarakat dengan capaian kinerja RA melalui survei terhadap 190 rumah tangga, sedangkan pendekatan kualitatif melengkapi hasil dengan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa aktor negara dan penerima manfaat RA. Data dikumpulkan dari September 2023 hingga Februari 2024, mencakup data primer dan sekunder terkait RA. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif dan inferensial, sementara data kualitatif memperkaya analisis. Hasil analisis bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana RA berjalan secara demokratis dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan operasional RA yang partisipatif dan bermakna.

Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik RA di Kabupaten Kubu Raya, Desa Pematang Tujuh, mencerminkan model *democracy-led agrarian reform*, ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah. Proses legalisasi aset tanah di wilayah transmigrasi memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Sertifikasi yang dilakukan

secara bertahap melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, meskipun dominasi peran negara tetap ada. Kombinasi partisipasi tinggi dan pemerintah yang responsif terbukti meningkatkan efektivitas RA khususnya dalam konteks kebutuhan masyarakat akan kepastian penguasaan tanah melalui legalisasi tanah. Di Kabupaten Sambas, di Desa Seret Ayon, meskipun partisipasi tinggi pada tahap persiapan, penurunan terjadi saat implementasi. Tantangan dalam pengorganisasian kelompok untuk pemanfaatan tanah menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar partisipasi lebih bermakna.

Di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Desa Mekarsari, pelaksanaan RA mencerminkan kategori *contested agrarian reform*, dengan dinamika antara penataan aset dan akses. Meskipun program Kampung Reforma Agraria berhasil mendistribusikan 225 bidang tanah (individu) dan tanah usaha (pengelolaan bersama melalui BUMDes), produktivitas dari tanah tersebut belum optimal. Peran serta masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan minim sehingga masyarakat tidak secara aktif (apalagi mandiri) memutuskan penggunaan tanah sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Di Kabupaten Malang, di Desa Tambakrejo, RA menunjukkan model *democracy-led agrarian reform*, partisipasi masyarakat tinggi dalam proses awal pengajuan pelepasan kawasan hutan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melepaskan kawasan hutan seluas 17,25 ha menegaskan komitmen kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam interaksi yang saling menguatkan antara negara dan masyarakat merupakan komponen dasar tata kelola tanah yang demokratis. RA yang efektif setidaknya harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Ketika partisipasi masyarakat terlaksana dengan bermakna, maka masyarakat akan mampu mengambil kendali atas keputusan lokal dalam menentukan bentuk penggunaan atas sumber daya yang tersedia (Pretty 1995).

Akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi kebijakan RA yang lebih partisipatif, di mana aktor negara dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan tanah dan akses yang dibutuhkan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini akan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Praktik RA di Indonesia menunjukkan bahwa peraturan sebagai instrumen rekayasa sosial perlu dikonstruksi kembali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 memiliki tujuan mulia, namun perubahan signifikan pada struktur sosial belum tercapai. Partisipasi masyarakat yang bermakna artinya penerima manfaat mampu secara mandiri memutuskan penggunaan sumber daya (tanah) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Implikasi manajerial dibutuhkan mencakup perubahan kebijakan operasional, penataan kembali kelembagaan operasional, integrasi partisipasi yang bermakna baik dalam penyelenggaraan RA maupun instrumen evaluasinya.

Kata kunci: interaksi negara dan masyarakat, model reforma agraria, partisipasi masyarakat yang bermakna



SUMMARY

ANDI TENRI ABENG. Development of Operational Policy for Agrarian Reform in Indonesia: Democratic Agrarian Reform through Internalization of Meaningful Community Participation. Supervised by JOYO WINOTO, ENDRIATMO SOETARTO dan YUDHA HERYAWAN ASNAWI.

@Hak cipta milik IPB University

Agrarian Reform (RA) in Indonesia is the government's effort to address the long-standing issue of land ownership inequality. The 1960 Basic Agrarian Law (UUPA) emphasized the social function of land rights for the welfare of the people. However, land ownership inequality remains a serious issue, with the majority of land assets controlled by a small number of entities. The development of agrarian policies in Indonesia, from the colonial era to the reform era, reflects efforts to address this inequality. Land legalization, land distribution and redistribution, as well as granting access have been implemented, but the positive impact on the welfare of society has not been optimal. One of the main challenges in the implementation of AR is community participation. Meaningful participation (not passive or manipulative participation) at every stage of AR implementation is a key element not only at the policy level but also at the practice level. Decision-making by state actors (as organizers) without considering the decisions of the community (as beneficiaries) is often ineffective and fails to meet expectations.

This study aims to develop an AR model in Indonesia based on global AR experiences and AR practices in Indonesia using the democratic land governance approach from Borras and Franco (2008) and pro-poor land governance from Borras and Franco (2010), evaluate AR performance based on the quality of performance outcomes and AR output achievements, as well as build a social construction of democratic AR based on meaningful community participation at the operational policy level. The research was conducted in regions that have implemented AR, namely in Kubu Raya Regency, Sambas, Pandeglang, and Malang.

This study uses a combination of quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach measures the relationship between the quality of interaction between the state and the community with AR performance outcomes through a survey of 190 households, while the qualitative approach complements the results with in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) with several state actors and AR beneficiaries. Data was collected from September 2023 to February 2024, covering both primary and secondary data related to AR. Quantitative data processing was performed using descriptive and inferential statistics, while qualitative data enriched the analysis. The analysis aims to identify how far AR has been implemented democratically and provide recommendations for participatory and meaningful operational AR policies.

Key findings from this study indicate that AR practices in Kubu Raya Regency, specifically in Pematang Tujuh Village, reflect a democracy-led agrarian reform model, characterized by high community participation and government responsiveness. The process of asset legalization in transmigration areas provides certainty of land rights for the community. Certification carried out gradually involves the community at each stage, although the state's role remains dominant.

The combination of high participation and a responsive government has proven to improve AR effectiveness, particularly in the context of the community's need for land ownership certainty through land legalization. In Sambas Regency, specifically in Seret Ayon Village, despite high participation at the preparation stage, a decline occurred during implementation. Challenges in organizing groups for land use show the importance of community involvement in decision-making to make participation more meaningful.

In Pandeglang Regency, particularly in Mekarsari Village, the implementation of AR reflects the contested agrarian reform category, with dynamics between asset arrangement and access. Although the Agrarian Reform Village program successfully distributed 225 individual land plots and collective land (managed together through BUMDes), the productivity of these lands has not been optimal. Community involvement, from planning to implementation, is minimal, so the community does not actively (let alone independently) decide land use based on needs and capacities. In Malang Regency, in Tambakrejo Village, AR demonstrates a democracy-led agrarian reform model, with high community participation in the initial process of forest area release. The Minister of Environment and Forestry's decision to release 17.25 hectares of forest area affirms the collaborative commitment between the community and local government.

The conclusion of this study is that community participation and government responsiveness in interactions between the state and the community are fundamental components of democratic land governance. Effective AR must at least involve meaningful community participation in the planning, implementation, and monitoring and evaluation processes. When community participation is implemented meaningfully, the community will be able to take control over local decisions in determining the use of available resources (Pretty 1995).

Finally, this research provides recommendations for a more participatory AR policy, where state actors and the community can collaborate in decision-making regarding land use and the access needed. Active community involvement in this process will build trust between the government and the community, as well as create policies that are responsive to the community's needs. AR practices in Indonesia show that regulations as instruments of social engineering need to be reconstructed to improve people's welfare. Although Presidential Regulation No. 62 of 2023 has noble goals, significant changes in the social structure have not been achieved. Meaningful community participation means that beneficiaries can independently decide how to use resources (land) according to their needs and capacities. Managerial implications are needed, including changes in operational policies, restructuring of operational institutions, and integrating meaningful participation both in the implementation of AR and its evaluation instruments.

Keywords: agrarian reform model, meaningful participation, state and society interaction



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2025 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN OPERASIONAL REFORMA AGRARIA DI INDONESIA: REFORMA AGRARIA DEMOKRATIS MELALUI INTERNALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA

ANDI TENRI ABENG

Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor pada
Program Studi Doktor Manajemen dan Bisnis

**DOKTOR MANAJEMEN DAN BISNIS
SEKOLAH BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2025**



@Hak cipta milik IPB University

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:

- 1 Prof. Dr. Ir. Harianto, MS
- 2 Dr. Sutaryono, MSi

Anggota Promosi Luar Komisi pada Sidang Promosi Terbuka:

- 1 Prof. Dr. Ir. Harianto, MS
- 2 Dr. Sutaryono, MSi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Judul Disertasi: Pengembangan Kebijakan Operasional Reforma Agraria
di Indonesia: Reforma Agraria Demokratis melalui
Internalisasi Partisipasi Masyarakat yang Bermakna

Nama : Andi Tenri Abeng
NIM : K1601202041

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Joyo Winoto, PhD

Pembimbing 2:
Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, M.A

Pembimbing 3:
Dr. Yudha Heryawan Asnawi, M.M



Diketahui oleh

Ketua Program Studi Pascasarjana
Manajemen dan Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc.
NIP 196009161986011001



Dekan Sekolah Bisnis:
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
NIP 196812291992031016



Tanggal Ujian Tertutup: 20 November 2024

Tanggal Lulus:

Tanggal Sidang Promosi Terbuka: 18 Desember 2024



PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024 ini adalah ekonomi kelembagaan program reforma agraria, dengan judul “Pengembangan Kebijakan Operasional Reforma Agraria di Indonesia: Reforma Agraria Demokratis melalui Internalisasi Partisipasi Masyarakat yang Bermakna”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Komisi Pembimbing, Joyo Winoto, PhD (Ketua), Prof. Dr. Drs. Endriatmo Soetarto, M.A, dan Dr. Yudha Heryawan Asnawi, M.M yang telah membimbing, mengarahkan dan banyak memberi saran dalam penulisan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Sekolah Bisnis, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsan, M.S, Ketua Program Studi Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan, M.Sc, penguji luar komisi pembimbing, Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S dan Dr. Sutaryono, M.Si. Dan juga terima kasih kepada Dr. Tanti Novianti, S.P., M.Si, dan Dr. Ir. Popong Nurhayati, MM.

Penghargaan ini juga penulis sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Banten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Malang beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis di lokasi penelitian. Juga kepada Sitti Hadijah, Rai Sita, Mohamad Shohibuddin, dan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga besar H.A. Ramlan Bagenda, H. Ahmad Damiri Bakry dan H. Henry Faisal beserta Ananda M. Ryan Nanda Faisal dan M. Reza Akmal Faisal yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya. Terima kasih juga kepada Affan, Muty, Bima, Chika, Olivia, Dhani, Tari, Laras, Ari dan Dimas yang turut membantu dalam proses penulisan disertasi. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis menyapa satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Tidak ada kesempurnaan dalam sains dan tidak ada ujung tertutup dalam penelitian. Penulis menyadari karya ilmiah ini masih membutuhkan keterbukaan pengkajian lebih lanjut. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Januari 2025

Andi Tenri Abeng

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Kebaruan (<i>novelty</i>)	5
II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Relasi Agraria	7
2.2 Hubungan Negara dan Tanah	8
2.3 Tanah dan Reforma Agraria	12
2.4 Institusi/Aktor Negara Penyelenggara Urusan Program Reforma Agraria	15
2.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penataan Aset dan Penataan Akses	18
2.6 Konsep <i>Democratic Land Governance</i>	23
2.7 Konsep Partisipasi	24
2.8 Penelitian terkait Reforma Agraria dan Partisipasi	26
2.9 Partisipasi yang Bermakna dalam Pengembangan Kebijakan Operasional Reforma Agraria	29
2.10 Kerangka Konseptual Penelitian	30
III METODE	33
3.1 Kerangka Operasional Penelitian	33
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis data	36
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Pengembangan Model Reforma Agraria di Indonesia	41
4.2 Evaluasi Kinerja Reforma Agraria berdasarkan Interaksi Negara dan Masyarakat	64
4.3 Konstruksi Sosial atas Reforma Agraria Demokratis melalui Partisipasi Masyarakat yang Bermakna	81
V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100
RIWAYAT HIDUP	135



DAFTAR TABEL

1	Sumber dan jenis TORA	18
2	Tipologi partisipasi	25
3	Ringkasan penelitian terkait reforma agraria dan partisipasi	26
4	Lokasi penelitian	35
5	Kebutuhan data, sumber, teknik, dan instrumen pengumpulan data	35
6	Tujuan, pendekatan, metode analisis dan <i>output</i> penelitian	37
7	Variabel, definisi operasional dan indikator tingkat kualitas interaksi negara-masyarakat pada program RA (X) dan evaluasi kinerja RA (Y)	38
8	Variabel, definisi operasional, dan indikator penilaian capaian RA	40
9	Karakteristik penerima manfaat RA di Desa Pematang Tujuh	50
10	Karakteristik responden subjek RA di Desa Seret Ayon, Sambas	53
11	Karakteristik subjek RA di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang	56
12	Karakteristik responden subjek RA di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang	58
13	Hasil uji perbandingan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah dalam pelaksanaan reforma agraria di 4 lokasi penelitian	61
14	Tipologi kualitas interaksi negara dan masyarakat dalam program penataan aset di empat lokasi penelitian	65
15	Tipologi kualitas interaksi negara dan masyarakat dalam program penataan akses di empat lokasi penelitian	66
16	Hasil uji perbandingan tingkat kualitas masyarakat pada program reforma agraria di empat lokasi penelitian	67
17	Tipologi kualitas capaian kinerja RA (variabel Y1) sesuai tingkat kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan RA di empat lokasi penelitian	69
18	Hasil uji perbandingan tingkat kualitas pelaksanaan RA, tingkat kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kinerja pemerintah	71
19	Hasil uji korelasi antara tipologi kualitas interaksi masyarakat dan negara dengan tingkat kualitas pelaksanaan program RA	72
20	Luas tanah RA yang diterima oleh masyarakat/disertifikasi di empat lokasi penelitian	74
21	Pihak yang menguasai tanah pada rumah tangga penerima manfaat program RA	75
22	Perubahan kondisi nafkah antara sebelum dan sesudah pelaksanaan RA di empat lokasi penelitian	78
23	Uji signifikansi perbedaan kualitas <i>output</i> program RA di empat lokasi	79
24	Hasil uji korelasi antara kualitas interaksi negara dan masyarakat dengan kualitas <i>output</i> RA	80
25	Rencana aksi percepatan reforma agraria	85

DAFTAR GAMBAR

1	<i>Agrarian dynamics: a conseptual framework</i> (Winoto 2023)	8
2	Organisasi pelaksana redistribusi tanah di Kanwil dan Kantah	17
3	Bisnis proses penyelenggaraan redistribusi tanah	21
4	Kerangka konseptual penelitian	32
5	Kerangka operasional penelitian	34
6	Model RA berdasarkan kualitas interaksi negara-masyarakat	46
7	Model RA berdasarkan kualitas capaian kinerja	47
8	Peta lokasi penelitian di Desa Pematang Tujuh, Kabupaten Kubu Raya	49
9	Model RA kasus di Kubu Raya berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas aktor negara	51
10	Peta lokasi penelitian di Desa Seret Ayon, Kabupaten Sambas	52
11	Model RA berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas aktor negara di Sambas	54
12	Peta lokasi penelitian di Desa Mekarsari, Kabupaten Pandeglang	55
13	Model RA berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas aktor negara di Pandeglang	57
14	Peta lokasi penelitian di Desa Tambakrejo, Kabupaten Malang	57
15	Model RA berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dan responsivitas aktor negara di Malang	59
16	Model RA di empat wilayah penelitian	60
17	Grafik tingkat kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program reforma agraria di empat lokasi penelitian	68
18	Matriks kesenjangan kinerja pelaksanaan RA di Kubu Raya	69
19	Matriks kesenjangan kinerja pelaksanaan RA di Sambas	70
20	Matriks kesenjangan kinerja pelaksanaan RA di Pandeglang	70
21	Matriks kesenjangan kinerja pelaksanaan RA di Malang	71
22	Perubahan kondisi sumber penghidupan masyarakat penerima manfaat program RA di Kubu Raya	76
23	Perubahan kondisi sumber penghidupan masyarakat penerima manfaat program RA di Sambas	76
24	Perubahan kondisi sumber penghidupan masyarakat penerima manfaat program RA di Pandeglang	77
25	Perubahan kondisi sumber penghidupan masyarakat penerima manfaat program RA di Malang	78
26	Konstruksi RA dengan partisipasi yang bermakna	89



DAFTAR LAMPIRAN

1	Karakteristik responden di Kabupaten Kubu Raya	101
2	Demokrasi dan <i>pro poor land governance</i> dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Kubu Raya	103
3	Kualitas output program RA di Kabupaten Kubu Raya	106
4	Karakteristik responden di Kabupaten Sambas	110
5	Demokrasi dan <i>pro poor land governance</i> dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Sambas	111
6	Kualitas <i>output</i> program RA di Kabupaten Sambas	114
7	Karakteristik responden di Kabupaten Pandeglang	117
8	Demokrasi dan <i>pro poor land governance</i> dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Pandeglang	119
9	Kualitas <i>output</i> program RA di Kabupaten Pandeglang	123
10	Karakteristik responden di Kabupaten Malang	126
11	Demokrasi dan <i>pro poor land governance</i> dalam pelaksanaan RA di Kabupaten Malang	128
12	Kualitas <i>output</i> program RA di Kabupaten Malang	131